

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan di suatu daerah. Permasalahan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yaitu masalah kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana manusia (personal maupun kelompok) tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dalam hal mempertahankan diri secara ekonomi dan meningkatkan taraf hidupnya (Syawie, 2011).

Kemiskinan memang persoalan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi. Tetapi, berkaitan pula dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Suhandi et al., 2018).

Menurut Kuncoro (Kuncoro, 2006, p. 115) di Indonesia sendiri untuk mengukur banyaknya jumlah penduduk miskin menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran ini dilakukan dengan melihat besar rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. 2.100 kalori per hari digunakan untuk patokan kebutuhan minimum makanan sedangkan untuk kebutuhan non-makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

Kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat dapat ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud dengan sumber daya manusia yang baik, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan

mengurangi pendapatan, hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai dan dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2013).

Selain itu kemiskinan juga dihubungkan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Maka dari itu persoalan kemiskinan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah dan masyarakat di Indonesia (Yuliany, 2022).

Dampak negatif dari kemiskinan akan menimbulkan permasalahan ekonomi, social, politik dan risiko lainnya yang tak terduga yang akan merugikan negara. Selain itu kemiskinan juga akan berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat yaitu dengan meningkatnya kriminalitas seperti pencurian di lingkungan yang disebabkan karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan demikian pemerintah akan merasa kesulitan untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik ekonomi sehingga akan berdampak terhadap pembangunan ekonomi disuatu negara (Harahap, 2006). Dalam menanggulangi kemiskinan, kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral (Rahayu, 2018).

Masyarakat yang menderita kemiskinan pada Maret 2023 di Indonesia sebanyak 25,9 juta lebih penduduk dengan garis kemiskinan (BPS). Secara regional, di Indonesia terdapat lima provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (BPS). Sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 5 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak di Indonesia

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)
Jawa Timur	4.188,81
Jawa Barat	3.888,60
Jawa Tengah	3.791,50

Sumatera Utara	1.239,71
NTT	1.141,11

Sumber: BPS

Permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yakni masih tingginya angka kemiskinan. Provinsi Sumatera Utara masuk kedalam salah satu provinsi di luar Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Terdapat 1,23 juta penduduk miskin pada Maret 2022 (BPS). Dengan demikian, provinsi Sumatera Utara menduduki posisi ke-4 dari jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia.

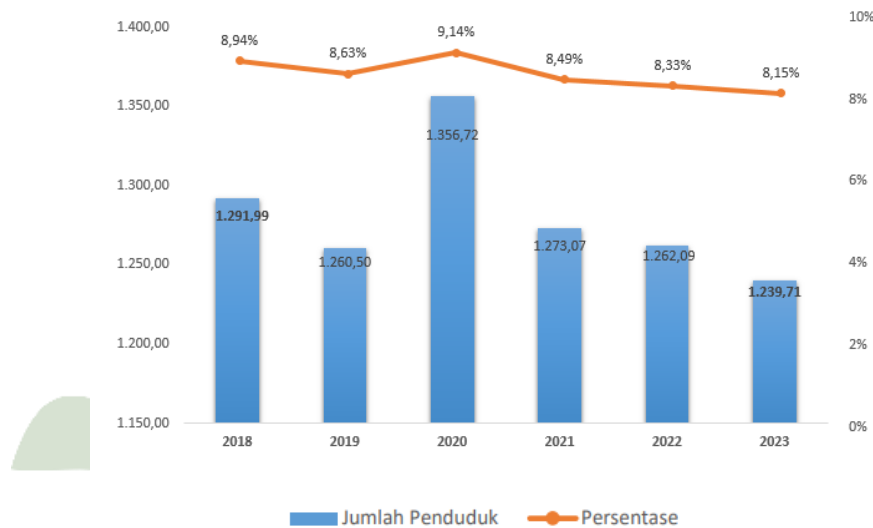
Selain itu, Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk terbesar jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Teori Maltkus dalam Skuosen (2009 : 85) menyatakan bahwa sumber daya di bumi tidak dapat memenuhi tuntutan populasi yang terus bertambah, dan karena kebutuhan manusia jauh lebih besar daripada jumlah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk memuaskan mereka, ini akan mendorong orang untuk hidup dalam kemiskinan karena akan ada banyak persaingan untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Hal ini menjadi salah satu penyebab di Provinsi tersebut persentase angka kemiskinan cukup besar di setiap tahunnya.

Oleh karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Sumatera Utara terus berupaya menanggulangi kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai, bantuan sembako dan intervensi program di sektor riil, berupa bantuan kepada petani, nelayan dan UMKM berupa pemberian bibit dan peralatan. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait menyampaikan, disamping intervensi yang dapat mengurangi pengeluaran masyarakat melalui pengendalian inflasi dan pemberian bantuan-bantuan, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi

melalui peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dengan berbagai program peningkatan pertumbuhan ekonomi seperti pemberdayaan UMKM (sumutprov.go.id).

Berikut gambar jumlah dan persentase tingkat kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2018-2023.



Gambar 1. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023

Berdasarkan Gambar 1.1 angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara cenderung fluktuatif, hal ini menunjukkan bahwa Di Sumatera Utara orang hidup dalam miskin masih tinggi. Tahun 2018, angka kemiskinan di Sumatera Utara adalah 1.291,99 ribu jiwa atau 8,94 persen. Pada 2019, angka kemiskinan 1.260,50 ribu jiwa atau 8,63 persen, turun 0,31 persen dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan di Sumatera Utara meningkat menjadi 1.356,72 ribu orang atau 9,14 persen, naik 0,51 persen dari tahun sebelumnya disebabkan karena munculnya wabah covid-19 pada 2020 lalu. Di tahun 2021 angka kemiskinan sebanyak 1.273,07 ribu jiwa atau 8,49% atau dengan kata lain mengalami penurunan sebesar 0,65 %. Dampak dari pandemi covid-19 yang semakin parah adalah banyaknya kegiatan ekonomi yang terhambat, sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin, turunnya gaji masyarakat bahkan memaksa sebagian orang

kehilangan pekerjaan karena PHK. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah di Sumatera Utara belum terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Sharp mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi: 1). Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. 2). Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. 3). Kemiskinan muncul diakibatkan perbedaan akses dalam modal (Kuncoro, 2006).

Ketiga penyebab kemiskinan di atas bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) oleh Nurkse 1953 dalam (Kuncoro, 2006, p. 132), yaitu adanya keterbelakangan dan keteringgalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas (berdampak pada tingginya pengangguran). Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan (tercermin oleh rendahnya upah) yang akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah.

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (daya beli) (Dewi et al., 2017). Dengan adanya peningkatan kualitas manusia maka dapat terpenuhinya kebijakan Pemerintah, terlebih meningkatkan kualitas penduduk miskin dengan memberikan keterampilan yang mana dapat mendorong adanya kegiatan produktif dari masyarakat miskin akhirnya mereka bisa mandiri dan lepas dari lingkaran kemiskinan.

Harapan yang ingin dicapai ialah memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi akan mempunyai tingkat kemiskinan yang rendah, maka indeks dari pembangunan manusia harus dikaitkan dengan positif pada kondisi sejauh mana kemiskinan di daerah tersebut (Pitaloka et al., 2022). Angka kemiskinan menurun seiring dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, mengindikasikan

bahwa indeks tersebut dapat menambah produktivitas tenaga kerja, menghasilkan peningkatan pendapatan dan kehidupan yang lebih baik.

Pada laporan *Human Development Index Ranking* tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-114 dengan index 0,750 atau 0,86% (*United Nations Development Programme, 2022*). Angka tersebut menggambarkan situasi pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, dan terlihat bahwa HDI di Indonesia masih tidak merata, seperti yang ada pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2 Status IPM atau HDI seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2022

N o.	Status Pembangunan	Kriteria	Jumlah Provinsi	Nama Provinsi
1.	$60,00 \leq \text{HDI} \leq 69,99$	Sedang	5	Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat
2.	$70,00 \leq \text{HDI} \leq 79,99$	Tinggi	27	Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Maluku, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jambi, Kalimantan Tengah, Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Aceh, Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Banten, Kalimantan Timur, Bali, Kep. Riau
3.	$80 \leq \text{HDI} \leq 100$	Sangat Tinggi	2	Di Yogyakarta, Dki Jakarta
	Total		34	Provinsi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa ke-34 provinsi di Indonesia tidak ada yang menempati posisi IPM terendah, ada 5 provinsi yang masuk kategori sedang, 27 provinsi yang menduduki peringkat HDI atau IPM tinggi dan hanya 2 provinsi yang masuk kriteria sangat tinggi. Dengan adanya data tersebut, kita bisa simpulkan

bahwa pembangunan manusia di Indonesia masih ada *gap* antar daerah, meskipun dari data yang didapatkan, adanya kenaikan angka indeks pembangunan manusia setiap tahun.

Konsep yang ditawarkan UNDP dalam mengukur tingkat pembangunan manusia sangat membantu untuk mengukur kesejahteraan dan kesenjangan, akan tetapi ada yang mengatakan bahwa HDI tidak efektif karena hanya mengukur 3 aspek saja, lalu lahirlah indeks alat ukur yang lain seperti HPI (*Human Poverty Index*), GPI (*Gender Development Index*), GE (*Gender Empowerment*), namun indeks tersebut jarang dipakai (Anto, 2011). Keberadaan HDI tersebut tidak sepenuhnya kompatibel dan cukup untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. Teori dan konsep yang mendasari untuk membangun HDI tidak didasarkan pada maqashid syariah. Untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan lebih tepat jika dilakukan dengan menggunakan *Islamic Human Development Index* (I-HDI), di mana teori dan konsepnya berdasarkan pada perspektif Islam (Rafsanjani, 2014).

Islam merupakan agama yang mempunyai pandangan luas dan menyeluruh mengenai pembangunan manusia, terlebih Islam selalu menekankan pencapaian falah dengan menggunakan *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* juga memfokuskan 3 aspek dalam pembangunan perspektif Islam, yaitu pendidikan, keadilan sosial dan kesejahteraan, tentu *Maqashid Syariah* bukan hanya sebatas peraturan yang harus ditaati, namun sebuah kerangka pedoman hidup manusia berdasarkan konsep masalah (Amin et al., 2015).

Beberapa cendekiawan muslim seperti Al-Ghazali, Al-Syatibi, Umer Chapra, Choudury, dll. mengemukakan teori pembangunan manusia dengan pendekatan *Maqashid Syariah* (Amin et al., 2015). Pengukuran *Islamic Human Development Index* menggunakan konsep *Maqashid Syariah* yang terdiri dari 5 hal: agama (*hifdz ad-dien*), jiwa (*hifdz an-nafs*), intelektual (*hifdz al- 'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*). Lima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, jika salah satu tidak terpenuhi maka otomatis *Maqashid Syariah* tidak terpenuhi.

Dengan adanya *Islamic Human Development Index* ini bisa menjadi alat ukur seberapa pembangunan manusia secara Islami khususnya pada negara yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, apalagi I-HDI sendiri mengukur dari aspek *material welfare* dan *non-material welfare*. Dengan adanya I-HDI, kita bisa mengetahui apakah agama Islam memengaruhi pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara (Amin et al., 2015).

Penelitian Septiarini dan Herianingrum (2017) menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam perhitungannya, pembangunan manusia di seluruh wilayah Jawa Timur pada tahun 2010–2014 dihitung dengan indikator IHDI dalam skala internasional dan menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Jawa Timur memiliki skor IHDI rendah sampai sedang. Namun, skor IHDI berbeda secara signifikan dengan skor HDI. Daerah dengan skor HDI yang tinggi ternyata mempunyai skor IHDI yang rendah.

Dalam tabel 1.2 menunjukkan bahwa provinsi Sumatera Utara berada dalam kelompok daerah yang memiliki IPM/HDI tinggi yakni antara 70,00-79,99. Sementara itu, penelitian yang dilakukan (Abidillah et al., 2022) justru menempatkan Provinsi Sumatera Utara di posisi terendah dengan nilai rata-rata 49,22. hal itu dipengaruhi dimensi *Addien* dan kasus kriminalitasnya tinggi. Dengan demikian, perlu ada penelitian lebih lanjut tentang hubungan IHDI dengan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Selain faktor di atas, terdapat juga indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di Sumatera Utara yaitu seberapa besar tenaga kerja terserap dalam bursa kerja. Penyerapan tenaga kerja merupakan suatu masalah utama dalam pembangunan Indonesia, baik di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Ledakan penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara lapangan kerja untuk menampung mereka tidak memadai (Yuliany, 2022).

Permasalahan ketenagakerjaan tidak hanya sekedar jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia atau rendahnya produktivitas, tetapi jauh lebih serius, yaitu kegagalan pada penciptaan lapangan kerja yang baru pada tingkat yang sebanding dengan laju pertumbuhan output yang dihasilkan (Todaro & Smith, 2006). Sehingga pemerintah menanggapi dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk

menyerap tenaga kerja yang ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dalam jumlah yang lebih banyak dirasa tidak dapat menyerap seluruh tenaga kerja dan pengangguran yang ada di suatu wilayah.

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu aspek yang membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan diperkirakan akan menurun karena lebih banyak tenaga kerja yang terserap. Jika peningkatan lapangan kerja tidak menyebabkan penurunan kemiskinan, maka kemungkinan kualitas pekerjaan saat ini harus ditingkatkan (Purnomo & Kusreni, 2020). Pendapat lain mengatakan bahwa yang memberikan dampak pada menurunnya angka pengangguran dan menguatkan pembangunan ekonomi berupa meningkatnya pekerja yang bekerja pada unit usaha pada perusahaan. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sebagai modal pembangunan daerah akan menjadi salah satu strategi pengentasan tingkatan kemiskinan.

Suatu perekonomian daerah dapat dikatakan stabil apabila tingkat penganggurannya di bawah 4 persen dari total pencari kerja (Budhi & Kembar, 2008). Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja erat kaitannya dengan pengangguran. Salah satu cara untuk melihat penyerapan tenaga kerja menurut (Kuncoro, 2006) dapat dilihat dari jumlah lapangan pekerjaan yang telah diisi yang dicerminkan melalui jumlah penduduk yang bekerja dalam suatu wilayah.

Tabel 1. 3 Penyerapan Tenaga kerja Di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Bekerja (Jiwa)	Jumlah Pengangguran (Jiwa)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
2018	7.124.458	396.027	71.82	5.56
2019	7.063.662	382.438	70.19	5.41
2020	7.350.057	507.805	68.67	6.91
2021	7.511.006	475.156	69.10	6.33
2022	7.734.006	423.657	69.53	6.16
2023	7.870.006	413.657	71.06	5.89

Sumber: BPS Sumatera Utara

Tabel 1.3 tersebut memperlihatkan penyerapan tenaga kerja Sumatera Utara dari segi jumlah bekerja sering mengalami pertumbuhan dan penurunan setiap tahunnya, dimana penyerapan tenaga kerja pada tahun 2019 penurunan daripada tahun 2018, di tahun 2023 penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara telah mencapai 7,8 juta jiwa bekerja. Dilihat dari tingkat partisipasinya juga bervariasi, pada tahun 2017 TPAK Sumut sebesar 68 persen dan bervariasi tiap tahun, di tahun 2020 TPAK Sumut sebesar turun menjadi 68,67 persen dan terus naik setiap tahun hingga pada penutup tahun 2023 TPAK Sumut sebesar 71 persen. Jika melihat jumlah pengangguran di Sumatera Utara mengalami penurunan namun jika dilihat dari tingkat pengangguran terbuka masih di kisaran angka 6 persen tahun 2020 hingga 2022 dan menjadi 5.89 persen pada tahun 2023.

Secara umum, tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat sehingga tingkat pengangguran menurun hingga 5.89 persen, namun jumlah tersebut masih tergolong tinggi, terlihat dari masih kecilnya persentase penurunan angka kemiskinan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara belum dapat mengentaskan kemiskinan dengan baik.

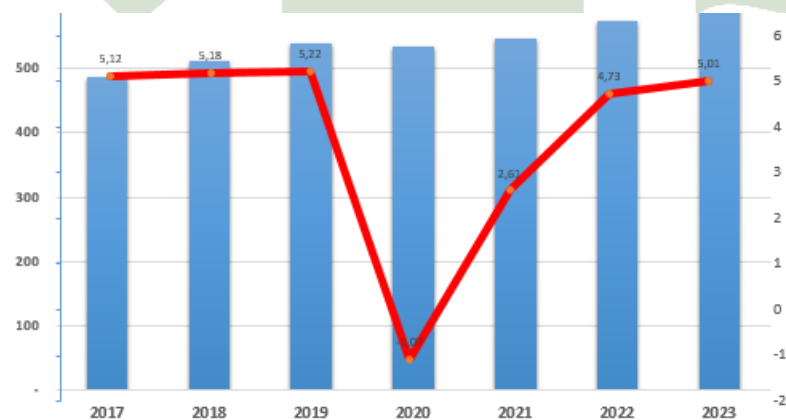
Literatur empiris tentang pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan sudah pernah dikaji dengan metode dan tahun yang berbeda, akan tetapi hasilnya tidak konsisten. Penelitian mengenai hubungan tenaga kerja kepada kemiskinan dilakukan oleh (Salsabilla et al., 2022), Yustitia et al. (2022) menemukan bahwa penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara penelitian oleh Nurlayli & Jumarni (2022), Muhamad & Masjkur, (2020) Kusreni, 2020) menemukan bahwa penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan dampak positif dan signifikan.

Selain faktor di atas, pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mengukur kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing provinsi menghasilkan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga menyiratkan peningkatan

jumlah produk atau jasa yang dihasilkan. Akibatnya, lebih banyak karyawan diperlukan untuk menghasilkan barang atau jasa ini, mengurangi kemiskinan dan memastikan bahwa kemiskinan terus turun (Yacoub, 2012).

PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (BPS). Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pola potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDRB merupakan salah satu ukuran dan indikasi penting untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya. Namun demikian tingginya PDRB tidak menjamin bahwa seluruh penduduk disuatu wilayah telah menikmati kemakmuran. PDRB hanya merupakan gambaran secara umum dari kesejahteraan masyarakat. Membaiknya indikator pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masalah kemiskinan yang menjadi isu penting. PDRB sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2019b, p. 115).



Sumber: BPS Sumatera Utara

Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.2 tersebut memperlihatkan laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara periode 2017 hingga 2023, di tahun 2017 PDRB Sumatera Utara yaitu Rp. 487531.23 miliar meningkat menjadi Rp. 512762.63 miliar di tahun 2018 yang memiliki rerata pertumbuhan diatas 5 persen jumlah tersebut merupakan diatas jumlah rerata pertumbuhan ekonomi nasional. Namun ditahun 2020 terjadi penurunan -1,07 persen (Rp.533.746,36 miliar) akibat dampak pandemi covid-19 yang ada di Indonesia serta mulai mengalami pertumbuhan 2,61 persen (Rp. 547651.82 miliar) pada tahun 2021. Tahun 2022 terus berangsur meningkat menjadi 4.73 persen. Puncaknya terjadi kenaikan pada tahun 2023 sebesar 5.01 persen (Rp. 602235.95 miliar). Dengan demikian terdapat peningkatan PDRB yang signifikan, meski belum mampu melampaui angka normal sebelum pandemi.

Kemiskinan hanya dapat berkurang dalam skala terbatas, apabila penduduk miskin hanya menerima sebagian kecil dari adanya penyaluran pertumbuhan ekonomi. Hasil temuan dari pertumbuhan ekonomi kepada kemiskinan dilaksanakan oleh (Mita & Usman, 2018) dan Savitri et al. (2022) menghasilkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Peneliti Purnomo & Kusreni, (2019) menghasilkan jika pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan ditemukan pengaruh yang negatif signifikan.

Perbedaan hasil penelitian tersebut juga didukung oleh data realita hubungan variabel penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di beberapa daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara sebagai berikut:

Tabel 1. 4 data Kemiskinan, TPAK dan PDRB di 4 Kota di Sumatera Utara

Kabupaten Kota	Tahun	Humbang Hasundutan	NIAS	Medan	Binjai
Kemiskinan	2018	9	16,37	8,25	5,88
	2019	8,75	15,94	8,08	5,66
	2020	9,36	16,6	8,01	5,71
	2021	9,65	16,82	8,34	5,81
	2022	8,86	16	8,07	5,1
	2023	8,69	15,1	8	4,79
TPAK	2018	87,74	81,44	64,35	62,03
	2019	91,17	81,41	65,99	66,78

	2020	88,55	84,69	64,89	66,89
	2021	87,13	81,16	63,62	65,14
	2022	84,17	81,79	62,16	62,77
	2023	85,83	84,5	62,23	58,61
PDRB ADHK	2018	5,58	4,95	5,92	5,46
	2019	5,7	5,04	5,93	5,51
	2020	-0,59	1,8	-1,98	-1,83
	2021	2,65	2,21	2,62	2,23
	2022	4,48	3,06	4,71	4,18
	2023	5,03	3,82	5,04	4,75

Sumber: BPS

Merujuk data tabel di atas terkait data penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, terdapat beberapa data yang tidak sesuai dengan teori terkait hubungan variabel independen terhadap variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Diantaranya pada tahun 2022 data penyerapan tenaga kerja di Humbang Hasundutan (84,17%) menurun dibandingkan tahun 2021 (87,13%), akan tetapi variabel Kemiskinan tahun 2022 menurun (8,86). Padahal secara teori Penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan. Pada tahun 2021 data pertumbuhan ekonomi di Humbang Hasundutan (2,65) meningkat dibandingkan tahun 2020 (-0,59), akan tetapi variabel Kemiskinan tahun 2021 bertambah (9,65). Padahal secara teori pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan. Pada tahun 2019 data penyerapan tenaga kerja di Nias (81,41) menurun dibandingkan tahun 2018 (81,44), akan tetapi variabel Kemiskinan tahun 2019 menurun (15,94). Padahal secara teori Penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan. Pada tahun 2021 data pertumbuhan ekonomi di Medan (2,62) meningkat dibandingkan tahun 2020 (-1,98), akan tetapi variabel Kemiskinan tahun 2021 justru bertambah. Padahal secara teori pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan. Pada tahun 2022 data penyerapan tenaga kerja di Medan menurun (63,62) dibandingkan tahun 2021 (64,89), akan tetapi variabel Kemiskinan tahun 2022 menurun. Padahal secara teori Penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan. Pada tahun 2022 data penyerapan tenaga kerja di Binjai menurun (62,77) dibandingkan tahun 2021 (65,14), akan tetapi variabel Kemiskinan tahun 2022 juga menurun (5,1).

Padahal secara teori Penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan. Kemudian, pada tahun 2021 data pertumbuhan ekonomi di Binjai meningkat (2,23) dibandingkan tahun 2020 (-1,83), akan tetapi variabel Kemiskinan tahun 2021 bertambah (5,81). Padahal secara teori pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

Dengan melihat data-data diatas ternyata Provinsi Sumatera Utara masih memiliki permasalahan terhadap kemiskinan. Begitu juga peneliti masih menemukan perbedaan hasil (*empirical gap*) dari penelitian terdahulu. *empirical gap* tersebut yang menjadi argumentasi pertama dalam penelitian ini. Argumentasi kedua terkait penggunaan pengukuran pembangunan manusia yang dihubungkan dengan pengentasan kemiskinan, dimana dalam penelitian terdahulu terdapat penelitian yang menggunakan IPM yang diukur hanya dari 3 dimensi, sementara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan I-HDI yang memiliki 5 dimensi dan 9 indikator serta dipandang lebih kompatibel dan berlandaskan *Maqasidh Syari'ah*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu seperti penelitian Pamuji (2019), penelitian Apriliana & Primandhana (2023), penelitian Chayani et al. (2020), penelitian Sembiring et al. (2020), penelitian Hidayat (2023), hanya menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan dalam penelitian ini menggunakan *Islamic Human Development Index* (I-HDI).

Penelitian yang dilakukan Nurlayli & Jumarni (2022), Nasyita (2020) mengenai variabel IHDI dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Sumatera Selatan dan Jambi. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu I-HDI, Penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belum ada penelitian khusus yang mengaitkan I-HDI dengan kemiskinan di Kabupaten Kota di Sumatera Utara.

Berdasarkan argumentasi yang dijelaskan peneliti, perbedaan hasil (*empirical gap*) dengan populasi dan data waktu yang berbeda, perlu dilakukan pengkajian yang kompherensif terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, dimana peneliti menggunakan tiga variabel independent (X) yaitu Variabel I-HDI (X1), Variabel Penyerapan Tenaga Kerja (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3); satu variabel dependent (Y) yaitu Tingkat Kemiskinan di

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, hal ini dimaksudkan supaya hasil temuan dari penelitian ini akan memperkuat dan memperjelas teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara”**

B. Batasan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti tentu perlu dilakukan pembatasan penelitian atau pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini *islamic human development index* (I-HDI), penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023

C. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terhadap tingkat kemiskinan?
2. Bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan?
4. Bagaimana pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI), penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil akhir dari perumusan masalah yang telah rangkum. Tujuan penelitian ini berupa:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terhadap tingkat kemiskinan

2. Untuk mengetahui pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan
4. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Human Development Index (I-HDI)*, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini setidaknya berguna dan bermanfaat untuk pihak- pihak sebagai berikut:

1. Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai alat dan jalan bagi peneliti untuk mengasah dan memperdalam kemampuan analisis serta jiwa kritis dalam menggali ilmu pengetahuan. Dapat memberi solusi bagi permasalahan dan problematika ekonomi syariah di masyarakat, serta dapat menjadi ladang amal bagi peneliti.

2. Pihak Praktisi dan Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan di daerah tentang pentingnya pemberantasan kemiskinan. Dengan melakukan peningkatan sumber daya manusia yang dilandaskan pada pendekatan-pendekatan syariah.

3. Pihak Akademisi

Penelitian ini akan sangat berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam metode pemberantasan kemiskinan dan hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi.